

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berikut kesimpulan pada penelitian yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Komunikasi Pemerintah Melalui Media Sosial di Kementerian Ketenagakerjaan RI”:

1. Akuntabilitas komunikasi pemerintah melalui media sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI menunjukkan adanya prosedur internal yang ketat, mulai dari pengambilan keputusan berbasis data, verifikasi lintas unit, hingga monitoring melalui sistem informasi manajemen (SIM-Kom). Hal ini mencerminkan akuntabilitas administratif yang kuat karena setiap konten telah melewati alur resmi dan terdokumentasi, serta disertai mekanisme evaluasi yang adaptif terhadap respon publik. Namun demikian, akuntabilitas substantif belum sepenuhnya terpenuhi karena informasi yang ditampilkan cenderung bersifat umum dan promotif, sementara detail teknis seperti alokasi anggaran, risiko, serta strategi mitigasi masih jarang disajikan secara terbuka di media sosial.
2. Transparansi komunikasi pemerintah melalui media sosial Kemnaker memperlihatkan komitmen regulatif yang kokoh, dengan adanya dasar hukum, SOP, PPID, serta audit internal maupun eksternal sebagai jaminan keterbukaan informasi. Meski demikian, praktik transparansi di media sosial masih terbatas pada ringkasan berupa infografis, siaran pers, atau video edukatif, tanpa selalu disertai tautan langsung ke dokumen resmi yang lebih lengkap. Kondisi ini membuat transparansi yang ditampilkan lebih bersifat formalitas ketimbang substantif, sehingga publik belum sepenuhnya memperoleh akses informasi detail secara mudah. Dengan demikian, meski fondasi regulasi dan mekanisme administratif sudah kuat, peningkatan kualitas dan kelengkapan informasi di media sosial masih diperlukan agar akuntabilitas dan transparansi komunikasi publik dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

5.2 Implikasi Penelitian

1. Akuntabilitas komunikasi di media sosial Kemnaker lebih kuat pada aspek administratif karena setiap konten melalui verifikasi berlapis dan monitoring SIM-Kom, namun akuntabilitas substantif masih terbatas sebab informasi yang dipublikasikan dominan bersifat umum dan promotif tanpa detail teknis (anggaran, risiko, langkah implementasi).
2. Transparansi komunikasi di media sosial Kemnaker ditopang oleh regulasi, SOP, dan mekanisme formal yang sudah lengkap, tetapi praktiknya hanya menampilkan ringkasan (infografis, siaran pers, video edukatif) tanpa tautan langsung ke dokumen resmi, sehingga transparansi yang tercapai masih bersifat formalitas dan belum substantif bagi publik.

5.3 Saran

Berikut saran dalam bentuk poin bernomor berdasarkan data di atas:

1. Perkuat transparansi substantif dalam konten media sosial. Disarankan menyoroti pentingnya penyajian informasi yang tidak hanya bersifat promosi umum, tetapi juga mencakup detail seperti alokasi anggaran, metode pelaksanaan program, potensi risiko, dan langkah mitigasi, agar publik dapat melakukan pengawasan yang lebih mendalam.
2. Analisis integrasi media sosial dengan kanal informasi resmi lainnya. Disarankan mengkaji sejauh mana media sosial terhubung secara efektif dengan website resmi, PPID, dan layanan publik lain, sehingga memudahkan akses ke dokumen resmi lengkap tanpa memaksa masyarakat melakukan pencarian terpisah.
3. Dorong pendekatan komunikasi yang lebih interaktif dan responsif. Disarankan untuk menilai bagaimana strategi media sosial Kemnaker dapat lebih aktif menanggapi pertanyaan, keluhan, atau isu sensitif secara terbuka dan konstruktif, menghindari jawaban normatif yang kurang membantu publik.
4. Tinjau efektivitas prosedur internal verifikasi informasi. Walaupun proses verifikasi sudah berjalan baik, penelitian dapat mengevaluasi bagaimana hasil verifikasi tersebut diterjemahkan ke dalam konten yang benar-benar mudah dipahami, lengkap, dan bermanfaat bagi publik.

5. Evaluasi peran Dimensi kinerja dalam mendukung akuntabilitas. Penelitian bisa menelaah sejauh mana target seperti engagement rate atau jumlah konten mendukung tujuan transparansi dan akuntabilitas yang lebih luas, serta apakah evaluasi kinerja media sosial sudah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan informasi detail.
6. Kaji dampak keterbukaan informasi terhadap partisipasi publik. disarankan menilai apakah strategi komunikasi Kemnaker di media sosial saat ini sudah cukup mendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi untuk mendorong peran publik lebih aktif.

